

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adolf, Huala, 2002, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, edisi revisi, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Afrianto, Eddy, et.al. 1996, *Kamus Istilah Perikanan*. Bandung: Kanisius.
- APEC Fisheries Working Group, 2008, *Assessment of Impact of Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing in the Asia-Paific*. Asia-Pasific Economic Cooperation Secretariat, Singapura.
- Buana, Mirza Satria, 2007, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Nusamedia:Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Jakarta : Balai Pustaka, hlm.1278.
- Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2006, *Kebijakan Pengawasan dalam Penanggulangan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*, Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- Departemen Kelautan dan Perikanan, 2008, *Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) Di Indonesia*, Laporan Akhir, Jakarta.
- Eddy, Rifai dan Khaidir Anwar. Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan. *Jurnal Media Hukum*, Desember 2014: Vol. 21 No. 2.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti, 2012, *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*, Graha Media:Yogyakarta.
- Ketut, Darmika, 2015, Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dalam Perspektif Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. November 2015: Vol. 4 No. 3, hlm. 496.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R.Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung : Alumni.
- Moleong, Lexy J, 2014, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Parthiana, I Wayan. 2014. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya..
- Rudy, T.May, 2002, *Hukum Internasional 2*. Bandung : Rafika Aditama.

- Shaw, Malcolm N. 1986, *International Law*, London : Butterworth.
- Simmons, Ben, 2003, Illegal Fishing in the Southern Ocean: The Problem, Practices and Perpetrators. *Australian Antarctic Magazine* 5 Winter.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Starke, JG, 1984, *Introduction to International Law*, London : Butterworth.
- Subagyo, P. Joko, 2009, *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutopo, HB, 2002, *Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis)*. Surakarta: BPIP.

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.
- United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS)
- International Convention for the Safety of Life at Sea* 1974 (SOLAS)
- International Regulations for Preventing Collisions at Sea (*COLREG's*)
- Konvensi Montevideo tahun 1933

C. JURNAL

- David, Anderson. "Methods of Resolving Maritime Boundary Disputes." Volume 1, Nomor 6, Tahun 2006.
- Erlina Esther Christie, R. A. Gusman Catur Siswandi, *Law Enforcement Issues and Regulations in Undelimited Maritime Boundaries: An International Law Perspective*, Jurnal Lentera Hukum, Volume 7, Nomor 1, Tahun 2020.
- Hadju Zainal Abdul Aziz, Analisis UNCLOS 1982 Terkait Permasalahan Yurisdiksi Negara dan Penegakan Hukum Atas Kapal Berbendera Negara Asing, Jurnal Hukum Internasional, Volume 27, Nomor 1, Januari 2021.

- Iman Santoso M, “Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian”, *Binamulia Hukum*, Volume 7, Nomor 1, Juli 2018.
- Julianingsih Hehanussa, et.al., Penegakan Hukum Illegal Fishing Yang dilakukan Oleh Kapal Asing di Wilayah Laut Indonesia Di Tinjau Dari Hukum Laut Internasional, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Jurusan Ilmu Hukum, Volume 1 No. 2 Tahun 2018.
- Pratiwi Dian Khoreanita, “Implementasi Prinsip Yurisdiksi Universal Mengenai Pemberantasan Kejahatan Perampokan Laut di Indonesia”, *Supremasi Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2018.
- Satriyo Kusumo, Ayub Torry and Handojo Leksono. 2013. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Wilayah Laut Indonesia-Malaysia.” *Yustisia Jurnal Hukum* 2(1):103–10.
- Usmawadi Amir, Penegakan Hukum IUU Fishing Menurut UNCLOS 1982 (Studi Kasus: Volga Case), *Jurnal Opinio*, Vol 12 Januari-April 2013.

D. ARTIKEL ILMIAH

- Aswin Bahar, *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Hak Imunitas Kepala Negara di Hadapan Pengadilan International Criminal Court (ICC) (Studi Kasus Omar Al-Bashir)*, Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Universitas Hasanudin, Tahun 2015.
- Suwardi Martowirono, Makalah: *Kepentingan (Untung Ruginya) Indonesia Meratifikasi Statuta Roma 1998*, Lokakarya Pembudayaan dan Pemasyarakatan Konvensi Jenewa 1949, Jakarta, 21 Juli 2002.
- Tim Pedoman Buku Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, “*Buku Pedoman Fakultas Hukum Edisi Revisi 2011*”, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011).

E. WEBSITE

- DKP, 2014, Jaga Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan perikanan, KKP terus Berantas Illegal Fishin dan Destructive Fishing, http://www.djpsdkp.kkp.go.id/2014/arsip/c/16/JAGA-KELESTARIAN-SUMBER-DAYA-KELAUTAN-DAN-PERIKANAN-KKP-TERUS-BERANTAS-ILLEGAL-FISHING-DAN-DESTRUCTIVE-FISHING/?category_id=21 diunduh pada 21 Agustus 2020, pukul 10.00
- Riza, Menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia, <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya->

- [menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia](#) diunduh pada 21 Juni 2020, pukul 13.20
- Demi Kedaulatan, Vietnam Dorong Militerisasi Armada Nelayan,
<https://www.dw.com/>, diunduh pada 15 April 2020, pukul 17:21 WIB
- Kemlu Panggil Duta Besar Vietnam pasca Insiden Kapal RI dan Vietnam,
<https://www.voaindonesia.com>, diunduh pada 1 Mei 2020 pukul 11.12 WIB
- Juli Hantoro, “*Kronologi KRI Tjiptadi-381 yang Ditabrak Kapal Vietnam*,”
TEMPO.CO, 29 April 2019,
<https://nasional.tempo.co/read/1200170/begini-kronologi-kri-tjiptadi-381-yang-ditabrak-kapal-vietnam>, diunduh pada 13 Oktober 2020, pukul 09.20 WIB
- P.J. Kwast. 2008. Maritime Law Enforcement and the Use of Force: Reflections on the Categorisation of Forcible Action at Sea in the Light of the Guyana/Suriname Award, *Journal of Conflict & Security Law*, Vol. 13 No. 1, hlm. 49, <https://www.semanticscholar.org/paper>, diunduh pada 8 Februari 2021, pukul 13.00 WIB
- K.A. Baumert, *The South China Sea disputes and law of the sea*,
<https://www.researchgate.net/publication/327564800>, diunduh pada 11 Januari 2021, pukul 09.13